

Untirta Berpredikat Badan Publik Informatif

JAKARTA - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) meraih predikat badan publik informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Surat keputusan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diserahkan Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana di Jakarta kepada Atasan PPID Untirta dalam hal ini Rektor Fatah Sulaiman, yang disaksikan Kepala BAKP Untirta sekaligus PPID Pelaksana Ganiadi beserta tim PPID.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana menyampaikan bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang maka Untirta mendapatkan poin 92,87. "Dengan hasil tersebut maka Untirta mendapatkan kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021," ujarnya. Hal tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor : 940A/KIP/XI/2021 perihal Klarifikasi Hasil Monev PTN Untirta Tahun 2021 yang ditujukan kepada Rektor Untirta.

Rektor Untirta Fatah Sulaiman mengucapkan rasa syukur atas capaian ini. "Hasil ini harus kita syukuri dengan terus meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Rektor.

Ia menambahkan, Untirta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan sebagai bentuk akselerasi implementasi visi dan misi lembaga. (fjr/bie)

Angka Kematian Ibu Meningkat

SERANG - Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Serang meningkat. Hingga November ini terjadi 69 kasus. Sementara tahun 2020 sebanyak 64 kasus.

Hal itu terungkap pada kunjungan lintas kementerian di Aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Kamis (11/11). Kunjungan diterima Staf Ahli Bupati Rahmat Fitriadi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) drg Agus Sukmayadi, dan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Tarkul Wasyit.

Kepala Dinkes Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi menjelaskan, ada beberapa faktor peningkatan kasus kematian ibu. Antara lain karena ibu hamil terpapar Covid-19. "Sebenarnya Covid-19 tidak menjadi penyebab kematian utama, tapi akan memperparah kondisi imun," katanya.

Kemudian, kecenderungan keluarga yang menolak untuk dirujuk ke rumah sakit. Masyarakat ketakutan dengan dirujuk ke rumah sakit akan divonis Covid-19 oleh dokter.

"Kan harus antigen dulu, masyarakat takut dicovidkan, padahal tujuan kita bukan itu," ujarnya.

Lalu, saat lonjakan Covid-19 ketersediaan ruangan pasien umum di rumah sakit terbatas. Karena, banyaknya pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. "Kemudian, rendahnya keikutsertaan KB jangka panjang juga jadi salah satu penyebabnya," terangnya.



KUNJUNGAN: Suasana kunjungan lintas kementerian di Aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Kamis (11/11).

Menurut Agus, kematian ibu bukan hanya disebabkan karena faktor medis. Tetapi dari sikap masyarakat yang harus diubah. "Masyarakat juga masih banyak yang menggunakan jasa dukun beranak untuk persalinan. Padahal tugas dukun beranak hanya mendampingi saja, tidak untuk persalinan," ucapnya.

Untuk menekan laju kasus kematian ibu, pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai upaya. "Dengan pertemuan ini, kementerian akan melakukan

pendampingan. Kemudian kita atasi persoalannya mulai dari hulu yakni sikap masyarakat," katanya.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri Zanariah mengatakan, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah yang angka kematian ibunya tinggi untuk melakukan penanganan. "Caranya dengan reproduksi kesehatan," katanya.

Ia mengatakan, ada 200 daerah di Indonesia yang tingkat kematian ibunya

tinggi. Kemudian, pihaknya menyaring lima daerah sebagai pilot project salah satunya Kabupaten Serang. "Nanti lima daerah ini jadi role model buat daerah lainnya," ujarnya.

Pihaknya melihat penanganan kematian ibu di Kabupaten Serang sudah bagus. Namun, masih dilakukan sendiri-sendiri. "Penanganannya harus lintas sektor, seperti kita juga sama lintas kementerian, ada dari Kemendagri, Kemenkes, Bappenas, BKKBN," pungkasnya. (jek/bie)



PARIPURNA: Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyalami anggota DPRD usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (11/11).

Realisasi Pendapatan Daerah Terancam Tak Tercapai

SERANG - Realisasi pendapatan daerah 2021 terancam tidak tercapai. Sampai akhir Oktober, realisasi pendapatan baru 72,84 persen.

Hal itu disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah pada Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2022 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Kamis (11/11).

Dalam penyampaiannya, Tatu mengatakan bahwa realisasi pendapatan

daerah hingga akhir Oktober sebesar Rp2,4 Triliun dari target Rp3,32 triliun atau tercapai 72,84 persen.

Melihat kondisi itu, Tatu mengaku berat jika harus mencapai 100 persen di sisa waktu kurang dari dua bulan ini. "Sepertinya berat, paling belanja daerah yang harus disesuaikan," katanya.

Ia meminta kepada seluruh OPD untuk mendahulukan pembayaran kepada pihak ketiga. "Karena sudah kontrak. Kalaupun tidak bisa harus

duduk bersama apakah dibayarkan pada tahun depan atau seperti apa," ujarnya.

Meski demikian, pihaknya masih berusaha untuk terus menggenjot pendapatan daerah. "Semoga sampai akhir tahun capaiannya tidak jauh dari target," ucapnya.

Sebelumnya, Pemkab Serang menyampaikan pendapatan daerah pada APBD 2022 diproyeksikan Rp2,60 triliun. Terkait itu, Tatu menyampaikan bahwa target itu bisa ditinjau kembali

pada APBD Perubahan 2022.

Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak bisa dipungkiri berdampak pada pendapatan daerah. Kondisi itu juga masih terjadi hingga saat ini.

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengatakan, Raperda APBD 2022 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Pembahasannya direncanakan pada 18 sampai 20 November," katanya. (jek/bie)



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA SERANG

Mengucapkan

Selamat Hari Kesehatan Nasional

• KE-57 TAHUN 2021 •



dr. Hj. TEJA RATRI, MM.Kes
Direktur



Academia

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

website : www.untirta.ac.id
e-mail : info@untirta.ac.id
phone : 0254-280330 Fax. 281254
Alamat : Jalan Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Kota Serang

MENCERMATI TSUNAMI DAN KETANGGUHAN WILAYAH TERHADAP BENCANA DI PROVINSI BANTEN

POTENSI tsunami di Provinsi Banten terletak pada wilayah pesisir pantai di bagian barat dan selatan Provinsi Banten. Menurut data yang sempat di himpun, kejadian ini memiliki jumlah korban jiwa meninggal sebanyak 426 orang, 7.202 orang terluka, dan 23 orang hilang (Mediastara, 2018). Penyebab utama Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tsunami di tersebut disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung Anak Gunung Krakatau (AGK) (McCurry dan Peraudin, 2018).

Akibat tsunami, kerusakan bangunan yang ada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten kurang lebih 556 rumah roboh, 9 hotel rusak berat akibat diterjang gelombang tsunami. Infrastruktur yang juga rusak adalah jalan raya dan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang terputus dan tidak dapat dilalui kendaraan. Karena pesisir pantai Pandeglang adalah obyek wisata terdekat dari DKI Jakarta, sehingga 60 warung kuliner, 350 kapal/perahu juga ikut rusak terkena dampak. Biasanya warung dan perahu tersebut selain digunakan untuk wisata juga sebagai usaha untuk penduduk sekitar pantai (Ya'cob, 2018). Kondisi ini segera di tangani dengan bantuan dana sosial perusahaan, APBD Pemkab Pandeglang dan Provinsi Banten bahkan APBN melalui BNPB baik secara langsung dalam bentuk bantuan maupun pendam-

pingan program rekonstruksi dan rehabilitasi.

Selain Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang merupakan daerah yang memiliki wilayah bahaya tsunami dengan klasifikasi bahaya rendah hingga tinggi. Kelas dominan pada wilayah bahaya tsunami tersebut adalah kelas bahaya tsunami tinggi dengan total luas area mencapai 377,64 ha (Paramitha dkk., 2021). Penelitian lain juga menyatakan bahwa hasil pengamatan pasca tsunami 2018 Selat Sunda, ketinggian gelombang tsunami yang terjadi di sekitar pesisir Kabupaten Serang bagian barat mencapai 3 meter dengan run up tsunami mencapai 6 meter (Muhari dkk., 2019).

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana membutuhkan pengkajian yang memadai atas bukti-bukti berupa kerusakan dan kerugian aset-aset kehidupan, privasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pasca-bencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala



ENGGAR UTARI
Koordinator Pusat Lingkungan Hidup dan Kajian Mitigasi Bencana LPPM Untirta

aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekedar hanya membangun kembali sarana dan prasarana setiap sektor yang rusak akibat bencana, akan tetapi dalam kebutuhan pemulihan ini juga harus mencakup kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan strategi ekonomi kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana serta membangun lebih baik dan aman (build back better and safer) sarana dan prasarana yang berbasis mitigasi atau peningkatan dan pengurangan risiko bencana. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan

dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun berdasarkan pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana maka Kebijakan Rekonstruksi antarlain berisi Membangun kembali dengan lebih baik dari sebelum kejadian bencana, dengan memahami bahwa suatu peristiwa bencana membawa hikmah untuk memberikan kesempatan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat melalui penataan prasarana, sarana dan sistem pelayanan masyarakat yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana. Selain itu upaya-upaya pengurangan risiko bencana, meliputi usaha pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses rekonstruksi agar risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin.

Rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang terdampak bencana tsunami tahun 2018 yaitu dengan dibangunnya 8 Hupertapuitu:

1. Kampung Reforma Agraria Desa Mekarsari sebanyak 155 Unit
2. Kampung Cibenda Desa Sukarame Kecamatan Carita sebanyak 32 unit

3. Kampung Malingping Desa Tunggal jaya sebanyak 10 unit
4. Kampung Sepen desa Banyumekar Kecamatan Labuan sebanyak 208 unit
5. Kampung Pasirjaya desa Cigorondong Jaya sebanyak 35 unit
6. Kampung Panilis desa Taman Jaya sebanyak 33 unit
7. Kampung Cikaung Desa Ujung Jaya sebanyak 10 Unit
8. Kampung Pasirmalang Desa Sumberjaya sebanyak 223 unit

Sejalan dengan sasaran kegiatan rekonstruksi maka pembangunan 8 hupertap pada delapan lokasi di Kabupaten Pandeglang yang berakhir pada Bulan September 2021 diharapkan digunakan secara optimal oleh penduduk yang mendapat hupertap tersebut, karena selanjutnya diharapkan akan:

Tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca-bencana.

Tercapainya kehidupan masyarakat pasca-bencana yang lebih baik dan lebih aman dari sebelum terjadinya bencana, yang mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi baru pasca-bencana.

Setelah terbangunnya Hunian tetap Pasca bencana Tsunami 2018 di

Kabupaten Pandeglang, Perguruan Tinggi dan mitra lain sebagai bagian dari Penta helix bisa memanfaatkan hupertap di delapan lokasi yang telah dibangun sebagai fasilitas sumber belajar untuk menggali, dan memahami dan mengimplementasikan kampus merdeka, merdeka belajar dari berbagai disiplin ilmu yaitu aspek ilmu arsitektur tahan gempa, Teknik Sipil, Ilmu Lingkungan, ilmu Ekonomi dan Sosiologi.

Selain itu sangat tepat jika dijadikan sebagai desa binaan demi terwujudnya perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian masyarakat tersebut memiliki ketangguhan. Ketangguhan wilayah menjadi sangat penting karena dapat menekan jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan jika akan terjadi tsunami. Upaya peningkatan ketangguhan wilayah yang telah ada diharapkan efektif dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, selanjutnya penilaian tingkat ketangguhan wilayah perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan dan kapasitas yang masih perlu diperbaiki. Dengan demikian diperlukan perumusan rekomendasi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan ketangguhan wilayah di Provinsi Banten agar lebih siap dalam menghadapi ancaman tsunami yang dapat datang sewaktu waktu. (*)